

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGIL JOKO SARJONO
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN
3. NHK : 714841

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.550.000.000

1. Tanah Seluas 1020 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 1010 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 1514 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 535 m2/200 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 205.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.755.000.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.755.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.